

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia berkewajiban menegakkan keadilan secara merata bagi seluruh warganya, tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Indonesia menganut prinsip kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat yang berpijak pada Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika (Novitasari, 2021). Dengan dasar tersebut, penegakan hukum di Indonesia bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum hadir untuk meminimalkan terjadinya tindak kejahatan dengan memberikan sanksi serta efek jera kepada pelaku, sekaligus menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa (Zakirah, 2022).

Narapidana merupakan individu yang sedang atau telah menjalani masa hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan dan akan kembali menjadi bagian dari masyarakat setelah masa pidananya berakhir. Proses reintegrasi sosial pasca pembebasan sering kali tidak berjalan mudah, sebab narapidana dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya ialah kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak. Kemandirian ekonomi menjadi faktor penting untuk mencegah terulangnya perilaku kriminal, karena ketergantungan terhadap orang lain atau aktivitas ilegal dapat memicu kemungkinan residivisme (Sutrisno, 2018). Kurangnya kesiapan kerja yang memadai sering kali membuat klien pemasyarakatan mengalami

pengangguran berkepanjangan, akibatnya berdampak pada penurunan kesejahteraan pribadi dan meningkatnya beban sosial serta ekonomi bagi masyarakat.

Salah satu faktor individu yang mendorong seseorang melakukan tindakan kejahatan yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tindakan kriminal kerap dijadikan jalan keluar. Perilaku menyimpang ini jelas bertentangan dengan norma dan ketertiban hukum, sehingga pelakunya harus dikenai sanksi pidana yang setimpal. Hukum pidana sendiri merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara berdaulat, berisi ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang atau diwajibkan, disertai sanksi bagi siapa pun yang melanggarnya. Aturan tersebut juga mengatur waktu, kondisi, serta mekanisme penerapan pidana yang pelaksanaannya dipaksakan oleh negara (Hiariej, 2016).

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk menangani berbagai persoalan hukum. Dalam *Integrated Criminal Justice System* (ICJS), lembaga pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari proses pemidanaan bagi seseorang yang memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga statusnya berubah menjadi narapidana (Warliyah & Sofyan, 2020). Pada tahap ini, pemasyarakatan memegang peran penting dalam memberikan pembinaan bagi pelanggar hukum. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan berkewajiban memberikan pelayanan dan perlakuan terbaik selama narapidana berada dalam tanggungjawabnya.

Adapun tugas lembaga pemasyarakatan mencakup penyediaan perawatan bagi tahanan, pembinaan terhadap narapidana, serta mempersiapkan mereka agar mampu kembali ke masyarakat dengan baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan ialah meningkatkan kualitas diri warga binaan. Proses pembinaan tersebut diarahkan agar klien pemasyarakatan mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada orang lain, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, serta memperbaiki diri agar dapat menjalani kehidupan yang benar setelah bebas.

Di Indonesia, pelaksanaan sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan pentingnya pembinaan untuk mencapai kemandirian serta keberhasilan reintegrasi sosial. Salah satu program utama dalam sistem tersebut adalah bimbingan kemandirian, yang meliputi pelatihan keterampilan kerja, pendidikan kewirausahaan, dan pengembangan mental. Tujuan dari kegiatan ini ialah memberikan bekal kepada klien pemasyarakatan agar memiliki kemampuan yang relevan untuk bersaing di dunia kerja setelah bebas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020). Namun, kenyataannya masih banyak klien pemasyarakatan yang keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern, sehingga mereka lebih rentan terhadap pengangguran dan potensi kembali melakukan kejahatan.

Sebagai salah satu institusi pemasyarakatan di Jawa Barat, Bapas Bandung memiliki tanggung jawab besar dalam membekali klien melalui program bimbingan kemandirian. Meski demikian, potret keberhasilan program ini masih

terkendala oleh rendahnya tingkat partisipasi aktif. Data internal Bapas Bandung tahun 2025 mengonfirmasi bahwa hanya terdapat 25 klien yang terdaftar dan berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pembinaan. Fenomena ini tidak lepas dari tekanan faktor internal berupa motivasi klien yang rendah, maupun faktor eksternal seperti stigma negatif masyarakat dan keterbatasan sarana penunjang (Balai Pemasarakatan Bandung, 2025).

Pada tingkat nasional, laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menunjukkan bahwa angka residivisme di Indonesia masih berada pada kisaran 30–40% dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya angka residivisme tersebut sebagian besar berkaitan dengan permasalahan ekonomi, terbatasnya akses terhadap lapangan kerja, serta rendahnya kesiapan kerja mantan narapidana pasca pembebasan (Kemenkumham, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek kemandirian dan kesiapan kerja merupakan faktor krusial dalam proses reintegrasi sosial klien pemsarakatan.

Temuan penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa klien pemsarakatan yang mengikuti program bimbingan kemandirian cenderung memiliki kesiapan kerja yang lebih baik dibandingkan dengan klien yang tidak mengikuti program serupa. Meskipun demikian, masih ditemukan kesenjangan antara keterampilan yang diperoleh melalui program pembinaan dengan tuntutan dan kebutuhan dunia kerja serta industri. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam dan sistematis untuk mengevaluasi efektivitas program bimbingan kemandirian dalam meningkatkan kesiapan kerja klien pemsarakatan pasca pembebasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan

dasar pengembangan program pembinaan di Balai Pemasarakatan Bandung, sehingga program bimbingan kemandirian dapat dilaksanakan secara lebih optimal, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Teori reintegrasi sosial yang dikemukakan oleh Travis (2005) menjelaskan bahwa kesiapan kerja tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga mencakup aspek psikologis seperti motivasi, kepercayaan diri, dan dukungan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan bimbingan kemandirian harus bersifat menyeluruh, meliputi pelatihan praktis, pendampingan psikologis, serta kerja sama dengan pihak industri (Sutrisno, 2018). Di Balai Pemasarakatan Bandung, meskipun telah ada kemitraan dengan sejumlah perusahaan lokal untuk program magang, pelaksanaannya masih terbatas, sehingga banyak klien pemasarakatan yang kembali ke masyarakat tanpa jaminan pekerjaan yang pasti.

Balai Pemasarakatan (Bapas) memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan keterampilan kerajinan kepada klien pemasarakatan. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian materi pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta pendampingan langsung dengan pembimbing kemasyarakatan hingga klien mampu menghasilkan karya kerajinan secara mandiri. Oleh karena itu, klien pemasarakatan perlu dibekali keterampilan sesuai kapasitasnya, diberikan pemahaman mengenai norma-norma kehidupan, serta dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial yang dapat meningkatkan rasa percaya diri. Melalui pembinaan ini, diharapkan klien pemasarakatan dapat hidup mandiri, memiliki daya saing ketika kembali ke masyarakat, dan tidak kembali melakukan tindak kejahatan (Syarifuddin, 2015).

Pembinaan kemandirian juga diarahkan untuk menggali dan mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki klien masyarakat, sehingga mereka tetap mampu berkarya dan mengembangkan kemampuan diri selama menjalani proses pembimbingan di Balai Masyarakat Bandung. Pembekalan tersebut memberikan motivasi bagi klien untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas personal, serta mengembangkan kemampuan ke arah yang lebih positif (Aisharhama & Irhandayani, 2020).

Klien masyarakat yang menjalani program pembebasan bersyarat perlu memperoleh pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam kontrak bimbingan yang telah disepakati sejak awal masa pembimbingan. Pembimbing masyarakat sebagai aparat penegak hukum bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, antara lain latar belakang dan kompetensi petugas, luasnya cakupan wilayah kerja, tingginya beban tugas, serta koordinasi yang harus terjalin dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain itu, dukungan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program, karena pembebasan bersyarat dilaksanakan dalam lingkungan sosial masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara pelaksanaan bimbingan kemandirian dengan tingkat kesiapan kerja klien masyarakat pasca pembebasan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan kualitas program pembinaan, sehingga klien

pemasyarakatan lebih siap menghadapi dunia kerja sekaligus menekan tingkat residivisme. Maka dari itu, penelitian ini berpotensi berkontribusi terhadap strategi pencegahan kejahatan melalui pendekatan rehabilitatif yang lebih efektif (Wahyudi, 2021).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk menguji pengaruh antara program bimbingan kemandirian yang dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Bandung dengan tingkat kesiapan kerja klien pemasyarakatan setelah pembebasan. Adapun fokus penelitiannya yaitu “Seberapa besar pengaruh bimbingan kemandirian terhadap kesiapan kerja klien pemasyarakatan pasca-pembebasan di Balai Pemasyarakatan Bandung?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah, dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan kemandirian terhadap kesiapan kerja klien pemasyarakatan pasca-pembebasan di Balai Pemasyarakatan Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Bimbingan Konseling Islam, dan juga memberikan informasi bagi para pembaca dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai

Pengaruh Bimbingan Kemandirian terhadap Kesiapan Kerja Klien Pemasarakatan Pasca Pembebasan di Balai Pemasarakatan Bandung.

2. Secara Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak berikut :

a. Bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS)

Sebagai bahan evaluasi dalam mengukur efektivitas Program Bimbingan Kemandirian (BIMKER) yang telah berjalan terhadap kesiapan kerja klien pemasarakatan.

b. Bagi Klien Pemasarakatan

Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesiapan mental dan keterampilan teknis sebagai modal utama dalam proses reintegrasi sosial, dan memberikan motivasi bagi klien pemasarakatan.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran yang bermanfaat untuk program rehabilitasi serta reintegrasi sosial, sehingga mantan narapidana dapat menjalani kehidupan yang produktif dan percaya diri agar dapat berkontribusi di ruang lingkup sosial dan masyarakat. Selain itu juga, penelitian ini dapat dibaca dan dikaji oleh pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

E. Kerangka Pemikiran

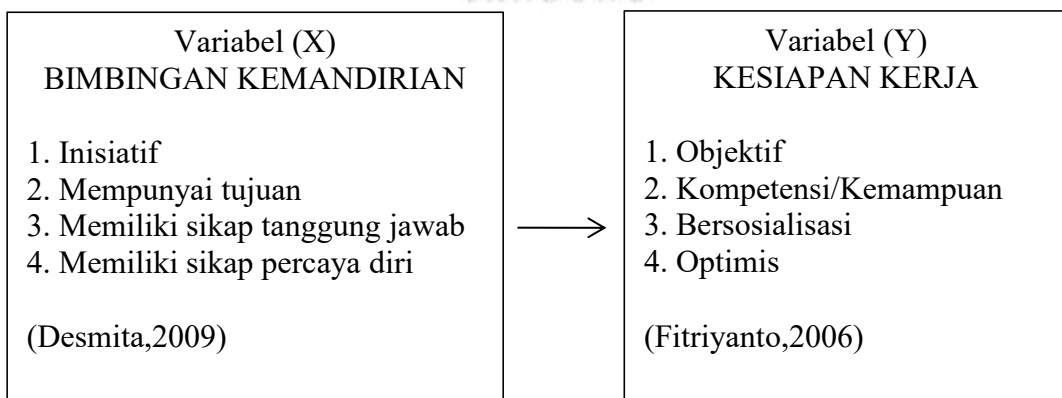
Kesiapan kerja merupakan faktor penting dalam proses reintegrasi sosial klien pemasarakatan setelah pembebasan. Individu yang memiliki kesiapan kerja yang

baik akan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menjalankan peran sosial secara produktif.

Menurut Desmita yang dikutip dalam Saputri (2019) sebagaimana dijelaskan kembali oleh Hanna Via (2025), indikator kemandirian meliputi beberapa indikator untuk mengukur kemandirian, yaitu : inisiatif, mempunyai tujuan, memiliki sikap tanggung jawab, dan memiliki sikap percaya diri. Penelitian ini menggunakan indikator kesiapan kerja yang dikembangkan oleh Cut Sriwahyuni (2021) berdasarkan teori Fitriyanto (2006), ada 4 aspek kesiapan kerja yaitu : Objektif, Kompetensi/Kemampuan, Bersosialisasi dan Optimis.

Berdasarkan alur pemikiran di atas, dihipotesiskan terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan kemandirian (Variabel X) terhadap tingkat kesiapan kerja klien masyarakat (Variabel Y). Kekuatan pengaruh ini akan diuji secara empiris melalui analisis statistik dalam penelitian ini.

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pemikiran



Tabel 1.1 Matriks Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Bebas (X) Bimbingan Kemandirian	Kemandirian adalah kemampuan individu untuk mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan dirinya tanpa bergantung pada orang lain (Desmita, 2009)	1. Inisiatif	- Bertindak tanpa menunggu perintah - Mencari solusi sendiri - Aktif dalam kegiatan	1-5 Likert
		2. Tujuan	- Memiliki rencana masa depan - Menentukan target - Memiliki arah hidup yang jelas	
		3. Sikap Tanggung jawab	-Menyelesaikan tugas - Disiplin - Bertanggung jawab atas keputusan	
		4. Percaya Diri	- Yakin terhadap kemampuan diri - Berani berpendapat - Tidak mudah ragu	
Variabel Terikat (Y) Kesiapan Kerja	Kesiapan kerja ialah kondisi individu yang menunjukkan kesiapan dalam memasuki dunia kerja (Fitriyanto, 2006)	1. Objektif	- Berpikir rasional - Mengambil keputusan berdasarkan fakta	
		2. Kompetensi / Kemampuan	- Memiliki keterampilan kerja - Menguasai bidang tertentu	
		3. Bersosialisasi	- Mampu bekerja sama - Mudah berinteraksi	
		4. Optimis	- Memiliki harapan positif - Tidak mudah menyerah	

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen berperan sebagai faktor yang memengaruhi atau menjadi penjelas, yang tujuannya untuk menilai dampaknya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, variabel dependen digunakan untuk mengamati sejauh mana variabel tersebut terpengaruh oleh variabel independen. Sesuai dengan fokus penelitian ini, bimbingan kemandirian (X) dijadikan sebagai variabel independen, sedangkan kesiapan kerja klien masyarakatan pasca pembebasan (Y) dijadikan sebagai variabel dependen.

F. Hipotesis

Hipotesis, menurut Nurdin dan Hartati (2019), adalah kesimpulan sementara yang memerlukan bukti, serta merupakan jawaban atau dugaan awal yang diajukan oleh peneliti mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel. Dengan mempertimbangkan definisi tersebut, hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis Nol (H_0) Tidak terdapat pengaruh bimbingan kemandirian terhadap kesiapan kerja klien masyarakatan pasca pembebasan.
2. Hipotesis Alternatif (H_1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan bimbingan kemandirian terhadap kesiapan kerja klien masyarakatan pasca pembebasan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah Balai Pemasarakatan (Bapas) Bandung yang terletak di Jl. Raden Roesbandi SH, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi tersebut merupakan lembaga resmi yang menangani klien pemasarakatan pasca pembebasan, memiliki program bimbingan kemandirian yang terstruktur, serta memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang relevan terkait kesiapan kerja klien setelah mengikuti pembinaan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Tersedianya data yang relevan dan dapat digunakan sebagai objek penelitian.
- b. Relevansi topik penelitian yang akan dilakukan, yaitu Pengaruh Bimbingan Kemandirian Terhadap Kesiapan Kerja Klien Pemasarakatan Pasca Pembebasan.
- c. Lokasi tersebut belum pernah dijadikan sebagai tempat penelitian yang mengkaji Pengaruh Bimbingan Kemandirian Terhadap Kesiapan Kerja Klien Pemasarakatan Pasca Pembebasan.

2. Paradigma dan Pendekatan

a. Paradigma

Paradigma penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik. Paradigma positivistik memandang bahwa suatu fenomena dapat diukur secara objektif melalui data empiris yang diperoleh

di lapangan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan angka-angka sebagai dasar analisis untuk mengetahui gambaran mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mendeskripsikan kondisi bimbingan kemandirian dan kesiapan kerja klien masyarakat pasca pembebasan berdasarkan data yang diperoleh dari responden melalui instrumen penelitian berupa angket.

b. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Tujuan dari pendekatan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen (bimbingan kemandirian) dengan variabel dependen (kesiapan kerja) secara sistematis dan terukur. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis indikator yang sudah ditentukan, kemudian dianalisis menggunakan SPSS untuk menguji hasil penelitian.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2022) Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen, yaitu bimbingan kemandirian, terhadap variabel dependen, yaitu kesiapan kerja klien masyarakat pasca pembebasan. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis indikator yang telah ditentukan dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis penelitian.

4. Jenis Data dan Sumber Data

a) Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Creswell (2012) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang menelaah permasalahan sosial melalui pengukuran variabel-variabel yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik guna menguji keabsahan teori yang digunakan. Dengan demikian, jenis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah, fokus penelitian, serta tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, data kuantitatif dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai seberapa besar pengaruh bimbingan kemandirian terhadap kesiapan kerja klien pemasyarakatan pasca pembebasan di Balai Pemasyarakatan Bandung. Data ini akan diperoleh melalui instrumen terukur sehingga memungkinkan analisis statistik yang objektif dan terstruktur.

b) Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis sumber data, yaitu:

1) Data primer diperoleh secara langsung dari responden, yaitu klien pemasyarakatan yang telah mengikuti program bimbingan kemandirian. Responden dipilih karena menunjukkan tingkat kesiapan kerja yang masih rendah setelah dibebaskan. Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dirancang untuk mengukur aspek kemandirian dan kesiapan kerja. Data primer dianggap penting karena memberikan

informasi faktual mengenai pengalaman nyata klien, tingkat perubahan perilaku, serta persepsi mereka terhadap efektivitas program (Sugiyono, 2022; Saefuddin et al., 2023).

2) Data sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembinaan kemandirian dan kesiapan kerja Klien Pemasarakatan (mantan narapidana). Data sekunder berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis dan memperjelas konteks penelitian (Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2020).

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Klien Pemasarakatan di Balai Pemasarakatan (Bapas). Populasi ini merupakan populasi target secara umum yang berada di bawah pengawasan lembaga tersebut. Berdasarkan pendapat Arikunto (2013), populasi penelitian ini adalah seluruh peserta bimbingan kemandirian di Balai Pemasarakatan Bandung yang memenuhi kriteria penelitian dan berjumlah 25 orang.

b. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, sehingga sampel yang dipilih benar-benar memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus kajian. Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel

sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti individu yang dianggap paling mengetahui atau mengalami langsung fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, *purposive sampling* dipilih karena tidak seluruh klien pemasyarakatan yang mengikuti program bimbingan kemandirian memiliki pengalaman yang utuh dan relevan untuk menilai dampak program terhadap kesiapan kerja pasca pembebasan. Oleh karena itu, peneliti menetapkan kriteria khusus agar sampel yang dipilih mampu memberikan data yang mendalam, akurat, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Klien pemasyarakatan yang telah menyelesaikan masa pidana dari lembaga pemasyarakatan (Lapas) pada tahun 2025.
- 2) Klien pemasyarakatan yang aktif dan berkontribusi secara konsisten dalam mengikuti program bimbingan kemandirian di Balai Pemasyarakatan Bandung (Bapas) sejak awal hingga akhir pelaksanaan program.
- 3) Klien pemasyarakatan yang menyatakan ketersediaan untuk menjadi responden penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang memenuhi persyaratan penelitian adalah sebanyak 25 orang klien pemasyarakatan. Menurut Sugiyono (2010) teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang

diperoleh nantinya bisa *representative*. Penelitian ini melibatkan 25 responden yang seluruhnya merupakan peserta program bimbingan kemandirian di Balai Pemasarakatan. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan sampel, dengan kriteria inklusi yakni klien pemasarakatan yang secara aktif telah mengikuti rangkaian bimbingan tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena berfungsi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan Kuesioner (Angket).

Instrumen utama yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup dengan skala Likert 1–5, yang terdiri atas pernyataan-pernyataan terkait program bimbingan kemandirian (variabel X) dan kesiapan kerja klien pemasarakatan pasca pembebasan (variabel Y). Responden diminta memberikan jawaban sesuai dengan tingkat persetujuan terhadap setiap pernyataan. Penggunaan kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif yang menggambarkan pengaruh program bimbingan kemandirian terhadap kesiapan kerja klien pemasarakatan setelah pembebasan, dengan lima tingkat persetujuan yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

7. Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang hendak diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2017), validitas merupakan tingkat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang berhasil dilaporkan oleh peneliti. Instrumen yang memiliki validitas tinggi menunjukkan bahwa setiap butir pernyataan dalam kuesioner mampu merepresentasikan variabel penelitian secara tepat. Dalam penelitian ini, uji validitas diterapkan pada instrumen bimbingan kemandirian (X) dan kesiapan kerja (Y). Mengingat jumlah responden yang relatif sedikit, yaitu sebanyak 25 orang, serta data yang diperoleh menggunakan skala Likert, maka pengujian validitas dilakukan dengan teknik korelasi Spearman Rank. Pemilihan teknik tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa korelasi Spearman tidak mensyaratkan data berdistribusi normal dan sesuai digunakan pada penelitian dengan jumlah sampel kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Imam Ghozali (2018) yang menyatakan bahwa korelasi Spearman Rank tepat digunakan untuk data berskala ordinal dan ukuran sampel yang terbatas. Setiap butir pernyataan dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r -hitung) lebih besar dibandingkan nilai r -tabel pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Sebaliknya, apabila nilai r -hitung lebih kecil daripada r -tabel, maka butir pernyataan dinyatakan tidak valid dan tidak digunakan dalam tahap analisis berikutnya.

Indikator pada setiap instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tersebut ditentukan berdasarkan derajat kebebasan (df) dengan rumus $df = n - 2$, sehingga diperoleh $df = 32 - 2 = 30$. Adapun perhitungan r hitung dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 22, dengan hasil pengolahan data yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Hasil Uji Validitas Bimbingan Kemandirian (X)

No Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X1	0,367	0.361	Valid
X2	0,378	0.361	Valid
X3	0,258	0.361	Tidak Valid
X4	0,341	0.361	Tidak Valid
X5	0,410	0.361	Valid
X6	0,256	0.361	Tidak Valid
X7	0,442	0.361	Valid
X8	0,451	0.361	Valid
X9	0,507	0.361	Valid
X10	0,167	0.361	Tidak Valid
X11	0,640	0.361	Valid
X12	0,548	0.361	Valid
X13	0,462	0.361	Valid
X14	0,372	0.361	Valid
X15	0,415	0.361	Valid
X16	0,574	0.361	Valid
X17	0,280	0.361	Tidak Valid
X18	0,336	0.361	Tidak Valid
X19	0,262	0.361	Tidak Valid
X20	0,316	0.361	Tidak Valid
X21	0,328	0.361	Tidak Valid
X22	0,313	0.361	Tidak Valid
X23	0,264	0.361	Tidak Valid
X24	0,515	0.361	Valid
X25	0,283	0.361	Tidak Valid
X26	0,242	0.361	Tidak Valid
X27	0,474	0.361	Valid
X28	0,146	0.361	Tidak Valid

No Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
X29	0,363	0.361	Valid
X30	0,465	0.361	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel bimbingan kemandirian yang terdiri dari 30 butir pernyataan, dinyatakan bahwa 16 item valid, sedangkan 14 item lainnya tidak valid. Item yang valid memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel, sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Sebaliknya, item yang tidak valid memiliki nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, sehingga tidak digunakan dalam analisis selanjutnya. Oleh karena itu, hanya 16 butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur bimbingan kemandirian dalam penelitian ini.

Tabel 1.3

Hasil Uji Validitas Kesiapan Kerja (Y)

No Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y1	0,602	0.361	Valid
Y2	0,503	0.361	Valid
Y3	0,459	0.361	Valid
Y4	0,167	0.361	Tidak Valid
Y5	0,664	0.361	Valid
Y6	0,663	0.361	Valid
Y7	0,393	0.361	Valid
Y8	0,252	0.361	Tidak Valid
Y9	0,493	0.361	Valid
Y10	0,555	0.361	Valid
Y11	0,658	0.361	Valid
Y12	0,744	0.361	Valid
Y13	0,303	0.361	Tidak Valid
Y14	0,572	0.361	Valid
Y15	0,527	0.361	Valid
Y16	0,402	0.361	Valid
Y17	0,677	0.361	Valid

No Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Y18	0,539	0.361	Valid
Y19	0,279	0.361	Tidak Valid
Y20	0,586	0.361	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas pada variabel Y (kesiapan kerja) yang terdiri dari 20 butir pernyataan, dinyatakan bahwa 16 item valid, sedangkan 4 item lainnya tidak valid. Item yang valid memiliki nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel, sehingga layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Sebaliknya, item yang tidak valid memiliki nilai r hitung lebih kecil dari r tabel, sehingga tidak digunakan dalam analisis selanjutnya. Dengan demikian, hanya 16 butir pernyataan yang digunakan untuk mengukur kesiapan kerja dalam penelitian ini.

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi atau keandalan suatu instrumen penelitian apabila digunakan secara berulang dalam kondisi yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto (2016), reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data karena memiliki kualitas yang baik. Dengan demikian, instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang relatif konsisten apabila digunakan pada waktu dan kondisi yang berbeda. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan terhadap instrumen yang telah dinyatakan valid dengan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Menurut Imam Ghozali (2018), suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai

Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Semakin tinggi nilai Cronbach's Alpha, maka semakin tinggi pula tingkat reliabilitas instrumen tersebut. Pengujian reliabilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen bimbingan kemandirian dan kesiapan kerja memiliki konsistensi internal yang memadai, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya dan layak digunakan dalam proses analisis penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program IBM SPSS Statistics, diperoleh tingkat reliabilitas instrumen sebagaimana ditunjukkan pada hasil perhitungan berikut.

Tabel 1.4
Hasil Uji Reabilitas Bimbingan Kemandirian (X)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,759	30

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, diperoleh nilai sebesar 0,759 dari 30 butir pernyataan. Nilai tersebut telah melampaui batas minimum reliabilitas yaitu 0,6, sehingga variabel bimbingan kemandirian dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki tingkat konsistensi yang baik.

Tabel 1.5
Hasil Uji Reabilitas Kesiapan Kerja (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
0,828	20

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, diperoleh nilai sebesar 0,828 dari 20 butir pernyataan. Nilai tersebut telah melampaui batas minimum reliabilitas yaitu 0,6, sehingga variabel kesiapan kerja dalam penelitian ini dinyatakan reliabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki tingkat konsistensi yang baik.

8. Teknik Analisis Data

a. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Mengingat jumlah sampel penelitian ini adalah 25 responden ($n < 50$), maka teknik yang digunakan adalah Uji *Shapiro-Wilk*. Data dinyatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi (*p-value*) $> 0,05$. Jika data normal, maka pengujian dapat dilanjutkan menggunakan statistik parametrik (regresi). (Usmandi, 2020).

2) Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel Bimbingan Kemandirian (X) dan variabel Kesiapan Kerja (Y) membentuk garis lurus (linear) atau tidak. Model regresi yang baik mensyaratkan adanya hubungan yang linear antara variabel independen dan dependen. Hubungan dinyatakan linear jika nilai *Deviation from Linearity* pada tabel ANOVA memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. (Khasanah, 2021)

Dasar Pengambilan Keputusan

Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.):

1. Jika Sig. $< 0,05$ → berpengaruh signifikan
2. Jika Sig. $> 0,05$ → tidak signifikan

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Heteroskedastisitas adalah Tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi variabel independen terhadap nilai *absolute residual* lebih besar dari 0,05. Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji glesjer. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen (Bimbingan Kemandirian). (Khoiroh, 2011).

b. Uji Pengaruh

1) Regresi Linier Sederhana: Digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Menurut Sugiyono (2017), analisis regresi digunakan untuk memprediksi perubahan nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. Sementara itu, Ghozali (2018) menjelaskan bahwa regresi linier sederhana bertujuan untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh antar variabel.

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = variabel dependen (Kesiapan Kerja)

X = variabel independen (Bimbingan Kemandirian)

a = konstanta (nilai Y jika X = 0)

b = koefisien regresi (besarnya pengaruh X terhadap Y)

2) Uji t (Uji Parsial): Untuk menguji apakah pengaruh Bimbingan Kemandirian terhadap Kesiapan Kerja signifikan secara statistik atau hanya kebetulan. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2018), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sugiyono (2016) menambahkan bahwa pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf kesalahan ($\alpha = 0,05$).

Dasar Pengambilan Keputusan

1. Berdasarkan nilai signifikansi (Sig.):

- Jika Sig. < 0,05 → berpengaruh signifikan
- Jika Sig. > 0,05 → tidak signifikan

2. Berdasarkan perbandingan t hitung dan t tabel:

- Jika t hitung > t tabel → signifikan
- Jika t hitung < t tabel → tidak signifikan

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel bimbingan kemandirian memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan kemandirian berpengaruh secara signifikan terhadap kesiapan kerja klien masyarakat.

3) Koefisien Determinasi (R^2): Untuk melihat berapa persentase (%) sumbangsih atau kontribusi Bimbingan Kemandirian dalam membentuk Kesiapan Kerja klien. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Menurut Ghozali (2018), nilai R^2 menunjukkan proporsi variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa nilai R^2 dinyatakan dalam persentase untuk menunjukkan kontribusi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.